

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan salah satu faktor utama yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang mengalami tekanan ekonomi. Kelompok ini sering kali menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam perspektif Islam, pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar ini telah ditegaskan melalui firman Allah SWT:

فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian." (QS. Adz-Dzariyat: 19).

Ayat ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki tanggung jawab sosial yang besar untuk membantu mereka yang berada dalam kesulitan, terutama dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar yang menjadi hak setiap individu. Tanggung jawab ini mencerminkan nilai-nilai solidaritas dan kepedulian sosial yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat dalam rangka menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan. Dalam konteks ini, program bantuan sosial menjadi salah satu wujud nyata dari pelaksanaan kewajiban sosial tersebut. Program ini dirancang tidak hanya untuk memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan tetapi juga untuk mendorong terciptanya kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Dengan adanya program ini, pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjalankan peran strategis dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan material maupun layanan yang memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok mereka. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

"Barang siapa yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan, maka dia tidak beriman."

(HR. Bukhari). Hadis ini mengingatkan kita bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama, khususnya bagi kelompok rentan.

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang atau sekitar 9,36% dari total populasi (BPS, 2023). Meskipun angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan masa-masa sebelumnya — misalnya pada September 2020 saat angka kemiskinan sempat naik ke 10,19% akibat dampak pandemi COVID-19 fluktuasi jumlah penduduk miskin tetap menjadi indikasi bahwa kemiskinan adalah persoalan struktural yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Secara historis, kemiskinan di Indonesia mengalami pola naik turun yang erat kaitannya dengan dinamika ekonomi, kebijakan pemerintah, serta faktor eksternal seperti krisis global. Faktor seperti ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja layak, dan minimnya perlindungan sosial yang efektif turut memperparah ketidakmampuan masyarakat miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dimana kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi telah menjadi pola kehidupan yang diwariskan antargenerasi karena keterbatasan akses dan peluang. Kemiskinan yang bersifat struktural ini juga terlihat dari kesenjangan wilayah. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan (12,22%) jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (7,29%). Keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan layanan dasar di wilayah perdesaan menyebabkan program-program pengentasan kemiskinan harus dirancang dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kontekstual. Selain itu, kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sering kali mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain, sebagaimana ditegaskan dalam laporan (UNDP, 2020).

Menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai strategi pengentasan kemiskinan, baik melalui program bantuan sosial seperti

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Digital (BPNT), maupun melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Salah satu intervensi terbaru adalah penguatan Bantuan Sosial Digital (BST), yang tidak hanya bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, tetapi juga mendorong keterhubungan masyarakat dengan sistem keuangan formal (Perpres No. 82 Tahun 2016).

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial (bansos) sebagai langkah strategis untuk menanggulangi kemiskinan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi kelompok yang rentan dan kurang mampu. Dalam beberapa tahun terakhir, bansos telah menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan perlindungan sosial yang dirancang untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Langkah ini semakin relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks, seperti dampak pandemi COVID-19, peningkatan angka inflasi, serta ketimpangan sosial yang masih menjadi persoalan signifikan di berbagai daerah.

(Suharto, 2009) Bantuan Sosial adalah salah satu instrumen dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang menghadapi risiko sosial dan ekonomi. Bantuan Sosial (bansos) adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang menghadapi risiko sosial dan ekonomi. Program ini bertujuan membantu kelompok rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Secara umum, kegunaan bantuan sosial adalah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat penerima manfaat, menjaga keseimbangan sosial, dan memitigasi risiko sosial yang dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara luas. Sasaran utama bansos meliputi individu atau kelompok masyarakat miskin, kelompok rentan seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak-anak terlantar, serta masyarakat terdampak bencana atau krisis ekonomi. Bantuan sosial memiliki manfaat yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang memerlukan perlindungan ekonomi dan sosial. Dengan memberikan akses terhadap

kebutuhan dasar seperti makanan dan pendidikan, bantuan sosial membantu meringankan beban hidup dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Melalui program ini, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas sosial dan memitigasi dampak dari ketimpangan ekonomi yang dapat mengarah pada masalah sosial yang lebih besar.

Melalui kebijakan Bantuan Sosial (Bansos) pemerintah berupaya menyediakan jaring pengaman sosial bagi kelompok miskin dan rentan, dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat serta memastikan akses mereka terhadap kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Program ini tidak hanya menjadi alat untuk merespons kondisi darurat, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia.

Pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Digital. Dalam Kebijakan tersebut bantuan sosial disalurkan menggunakan mekanisme digital, bukan dalam bentuk uang digital langsung atau natura seperti beras atau paket sembako. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, sekaligus mengatasi kendala yang sering muncul dalam distribusi bantuan secara konvensional. Melalui peraturan ini, penyaluran bantuan sosial yang sebelumnya berbentuk barang atau digital mulai dialihkan ke mekanisme non-digital menggunakan sistem perbankan, seperti rekening penerima manfaat atau kartu elektronik. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi risiko kebocoran, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bantuan langsung diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, kebijakan ini mendorong penerima manfaat untuk menggunakan layanan keuangan formal, memberikan keleluasaan dalam memanfaatkan bantuan, serta memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan teknologi untuk memperbaiki pelayanan sosial dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan kesejahteraan sosial yang dirancang untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Dalam praktiknya, bantuan sosial di Indonesia disalurkan dalam dua bentuk utama, yaitu bantuan berupa barang dan bantuan berupa uang digital. Masing-masing jenis bantuan ini memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri, tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang melatarbelaknginya.

Bantuan sosial berbentuk barang memiliki keunggulan utama dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dalam hal jenis dan kegunaan. Misalnya, dengan memberikan paket sembako yang terdiri atas beras, minyak goreng, telur, dan kebutuhan pokok lainnya, pemerintah dapat menjamin bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara langsung. Model ini juga cenderung lebih terkontrol, karena jenis dan jumlah bantuan telah ditentukan sebelumnya, sehingga meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan oleh penerima. Hal ini menjadi sangat penting terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan belum memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik. Selain itu, dalam konteks krisis seperti pandemi atau bencana alam, bantuan dalam bentuk barang lebih dapat diandalkan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan di tengah keterbatasan akses dan kenaikan harga pasar.

Namun demikian, bantuan sosial dalam bentuk barang juga bukan tanpa kendala. Proses pengadaan, distribusi, dan logistiknya sering kali memakan waktu dan biaya yang besar. Tidak jarang pula terjadi masalah seperti keterlambatan penyaluran, kualitas barang yang kurang baik, hingga terjadinya kebocoran dan penyimpangan dalam proses distribusinya. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan yang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, model ini juga cenderung kurang memberikan ruang bagi penerima manfaat untuk menentukan prioritas kebutuhannya secara mandiri, karena bantuan yang diterima bersifat seragam dan tidak fleksibel. Sedangkan, bantuan sosial berbentuk digital menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi kepada penerima manfaat. Dengan dana digital yang diterima, masyarakat memiliki keleluasaan untuk mengatur dan

menyesuaikan penggunaan bantuan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan aktual mereka. Misalnya, sebagian masyarakat mungkin lebih membutuhkan dana untuk membayar biaya pendidikan anak, membeli obat-obatan, atau membayar sewa tempat tinggal, yang tidak dapat dipenuhi melalui bantuan dalam bentuk barang. Pendekatan ini juga dapat memangkas biaya operasional pemerintah karena tidak perlu lagi melakukan pengadaan dan distribusi barang secara langsung. Dari sisi ekonomi lokal, bantuan digital juga memiliki potensi mendorong perputaran uang di tingkat masyarakat karena dana yang diterima akan dibelanjakan di warung, toko, atau pasar lokal.

Fleksibilitas dalam bantuan digital juga membuka ruang yang lebih besar terhadap potensi penyalahgunaan. Tidak semua penerima bantuan memiliki literasi keuangan yang memadai, sehingga tidak sedikit yang menggunakan dana tersebut untuk membeli barang-barang konsumtif yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok, seperti rokok, pulsa, atau bahkan barang mewah dalam skala kecil. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa bantuan digital justru tidak memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin, karena tidak digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, kurangnya mekanisme kontrol yang ketat juga menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan efektivitas penggunaan bantuan digital.

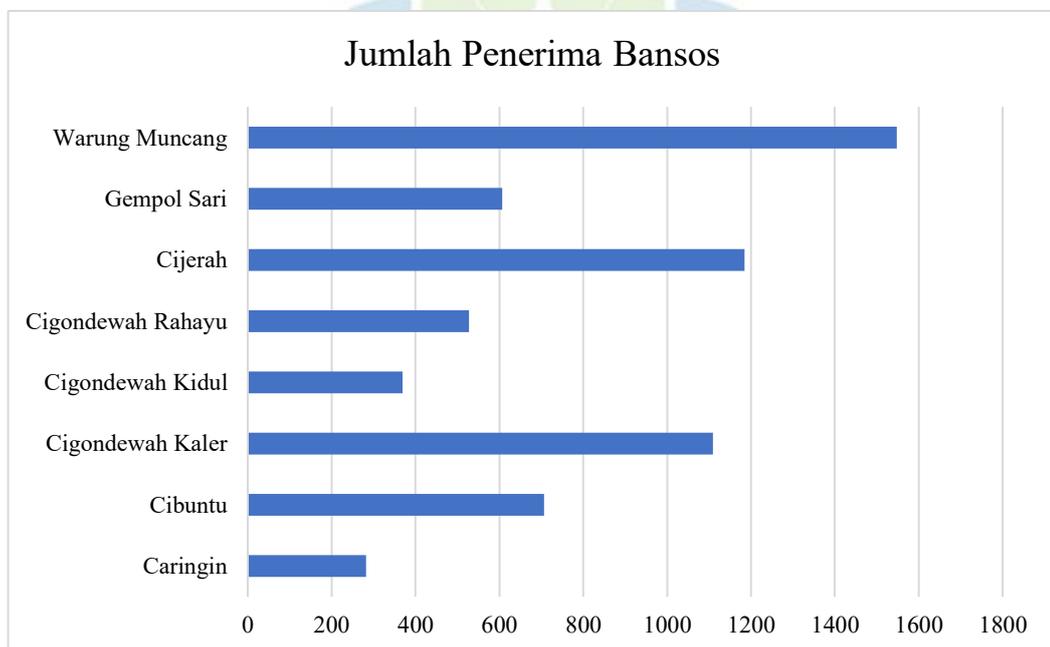
Dalam konteks dinamika kebijakan sosial di Indonesia, isu pergeseran dari bantuan berbentuk barang ke bantuan berbentuk digital menjadi salah satu topik yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Pemerintah secara bertahap telah mengubah skema bantuan sosial dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efisiensi anggaran, efektivitas program, hingga pemberdayaan masyarakat. Perubahan kebijakan ini didasarkan pada harapan bahwa bantuan digital dapat memberikan keleluasaan sekaligus tanggung jawab yang lebih besar kepada penerima manfaat dalam mengelola bantuan yang diterima. Selain itu, digitalisasi sistem penyaluran bantuan melalui rekening bank atau dompet digital juga dianggap dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan distribusi bantuan kepada masyarakat. Pergeseran ini juga menuntut adanya upaya

pendampingan dan edukasi kepada masyarakat, agar bantuan yang diterima benar-benar digunakan secara bijak dan tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pengawasan terhadap bantuan digital diperkuat, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Di sinilah letak tantangan sekaligus peluang bagi para peneliti, pembuat kebijakan, dan pelaksana program sosial untuk mengkaji dan mengevaluasi secara kritis dampak dari perubahan skema bantuan ini terhadap kesejahteraan masyarakat miskin.

Wacana dan praktik peralihan dari bantuan sosial berbentuk barang ke bantuan sosial berbentuk digital bukan hanya soal perubahan mekanisme distribusi, melainkan juga menyangkut perubahan paradigma dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini menempatkan penerima bantuan bukan sekadar sebagai objek penerima, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menentukan bagaimana bantuan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, studi dan penelitian mengenai efektivitas, relevansi, dan dampak dari perubahan kebijakan ini menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan data BNBA Bansos PT Pos Indonesia tahun 2025, terlihat bahwa penerima manfaat program bantuan sosial tersebar secara merata di berbagai kelurahan di Kecamatan Bandung Kulon, seperti Kelurahan Caringin, Cibuntu, Cigergedé, dan kelurahan lainnya. Penyebaran ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak terkonsentrasi di satu titik, tetapi menjadi masalah lintas wilayah dalam satu kecamatan. Banyak keluarga di wilayah ini yang sangat bergantung pada bantuan sosial sebagai sumber utama untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Hal ini mempertegas pentingnya peran program bantuan sosial dalam menopang kehidupan masyarakat kurang mampu, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, seperti saat terjadi inflasi, pandemi, atau krisis harga kebutuhan pokok. Program ini menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab negara dalam menyediakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi warganya yang rentan. Bantuan tersebut diharapkan tidak hanya sekadar meringankan beban sesaat,

tetapi juga dapat menjadi sarana pemberdayaan agar masyarakat mampu keluar dari jerat kemiskinan secara bertahap. Namun, agar bantuan sosial dapat berjalan optimal, diperlukan sistem pendataan yang akurat, mekanisme distribusi yang transparan, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Selain itu, pendampingan terhadap penerima manfaat juga sangat penting, terutama dalam skema bantuan digital, agar dana yang diterima benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas. Oleh karena itu, menelaah pelaksanaan bantuan sosial di Kecamatan Bandung Kulon tidak hanya penting sebagai bagian dari evaluasi kebijakan, tetapi juga dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan sosial yang lebih adaptif, inklusif, dan berdampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan secara menyeluruh.



Grafik 1.1 Jumlah Penerima Bansos 2024

Sumber: (Pengolahan DTKS Kemensos Bandung Kulon, 2024)

Berdasarkan **grafik 1.1** Jumlah Penerima Bansos 2024, didapatkan jumlah penerima bantuan sosial di Bandung kulon sebanyak 6.334 orang, dengan Kelurahan Warung Muncang sebagai kelurahan dengan penerima terbanyak. Sebagian besar penerima manfaat di Kecamatan Bandung Kulon telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah telah melakukan pendataan yang komprehensif untuk memastikan bahwa bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Di wilayah tersebut, penerima manfaat mayoritas mendapatkan bantuan dalam bentuk paket sembako, yang dirancang untuk mendukung ketahanan pangan keluarga miskin. Dengan adanya sistem ini, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam distribusi bantuan, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Wilayah ini menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji sejauh mana bantuan sosial, baik yang berbentuk barang maupun digital, dapat memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Berbagai dinamika sosial dan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas program bantuan sosial (bansos) di tingkat lokal. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan penerima manfaat, akses terhadap pasar atau tempat pembelanjaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara program memainkan peran penting dalam menentukan dampak bansos. Penerima manfaat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mampu memahami prosedur dan mengelola bantuan secara efektif, sementara mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan sering menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi terkait program. Selain itu, aksesibilitas terhadap pasar menjadi faktor krusial, terutama di daerah dengan infrastruktur terbatas, di mana lokasi pembelanjaan dapat memengaruhi nilai manfaat bantuan yang diterima. Variasi harga barang di setiap pasar juga menambah kompleksitas ini, karena harga bahan pokok yang berbeda-beda di pasar tradisional, minimarket, atau toko modern dapat memengaruhi daya beli penerima manfaat. Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara program juga menjadi elemen penting, yang bergantung pada transparansi distribusi bantuan dan konsistensi pelaksanaannya. Dengan memahami konteks sosial dan ekonomi yang unik di Kecamatan Bandung Kulon, termasuk pengaruh variasi harga di berbagai tempat pembelanjaan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas bansos, sehingga dapat menjadi masukan berharga dalam penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kebijakan perubahan bentuk bantuan sosial dari bentuk barang menjadi bentuk digital, dengan fokus pada dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Pergeseran bentuk bantuan ini mencerminkan arah baru dalam kebijakan sosial pemerintah yang berusaha untuk meningkatkan efisiensi distribusi serta memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada penerima manfaat. Dalam kerangka tersebut, bantuan digital diharapkan dapat memberi keleluasaan bagi masyarakat miskin untuk menentukan sendiri prioritas kebutuhan yang paling mendesak, sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing keluarga. Penelitian ini mengkaji bagaimana perubahan tersebut diterima dan dirasakan oleh masyarakat penerima bantuan, apakah benar-benar memberikan manfaat nyata, atau justru menimbulkan permasalahan baru dalam hal pengelolaan keuangan, ketepatan penggunaan, dan kontrol terhadap penggunaan dana. Kecamatan Bandung Kulon dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki jumlah penerima bantuan yang tinggi serta tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang cukup kompleks, menjadikannya sebagai representasi yang relevan untuk mengkaji implementasi bantuan digital secara lebih mendalam. Selain itu, perubahan kebijakan ini juga membawa implikasi yang tidak kecil terhadap proses birokrasi, pendataan, serta mekanisme penyaluran yang sebelumnya telah berjalan dengan sistem bantuan barang, sehingga perlu dianalisis lebih jauh mengenai efektivitas serta efisiensi dari sistem yang baru diterapkan.

Lebih dari sekadar menilai perubahan bentuk bantuan, penelitian ini juga diharapkan mampu menghasilkan temuan-temuan yang berguna dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial di masa mendatang. Dengan menggali pengalaman langsung dari penerima manfaat, serta melihat proses administratif dan teknis di lapangan, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana kebijakan bantuan digital berjalan dalam praktik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan pusat dalam merancang strategi penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat miskin. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi

dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam konteks evaluasi kebijakan sosial dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Perubahan kebijakan bantuan sosial dari bentuk barang ke bentuk digital bukan hanya menyangkut persoalan teknis distribusi, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma dalam pendekatan pembangunan sosial yang lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga miskin. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara teoritis dan akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan berikut:

1. Masih terdapat kesenjangan antara tujuan program dan hasil yang dicapai
2. Pelaksanaan program belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat
3. Fleksibilitas penggunaan bantuan digital menimbulkan risiko penyalahgunaan.
4. Variasi persepsi dan tingkat kepuasan penerima manfaat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencapaian tujuan program bantuan sosial berbentuk digital terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung?
2. Bagaimana efisiensi program bantuan sosial berbentuk digital terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung?
3. Bagaimana relevansi program bantuan sosial berbentuk digital terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung?

4. Bagaimana kepuasan terhadap program bantuan sosial berbentuk digital terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan pencapaian tujuan program bantuan sosial berbentuk digital terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan efisiensi program bantuan sosial berbentuk digital terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan relevansi program bantuan sosial berbentuk digital terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
4. Mengetahui dan mendeskripsikan kepuasan program bantuan sosial berbentuk digital terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

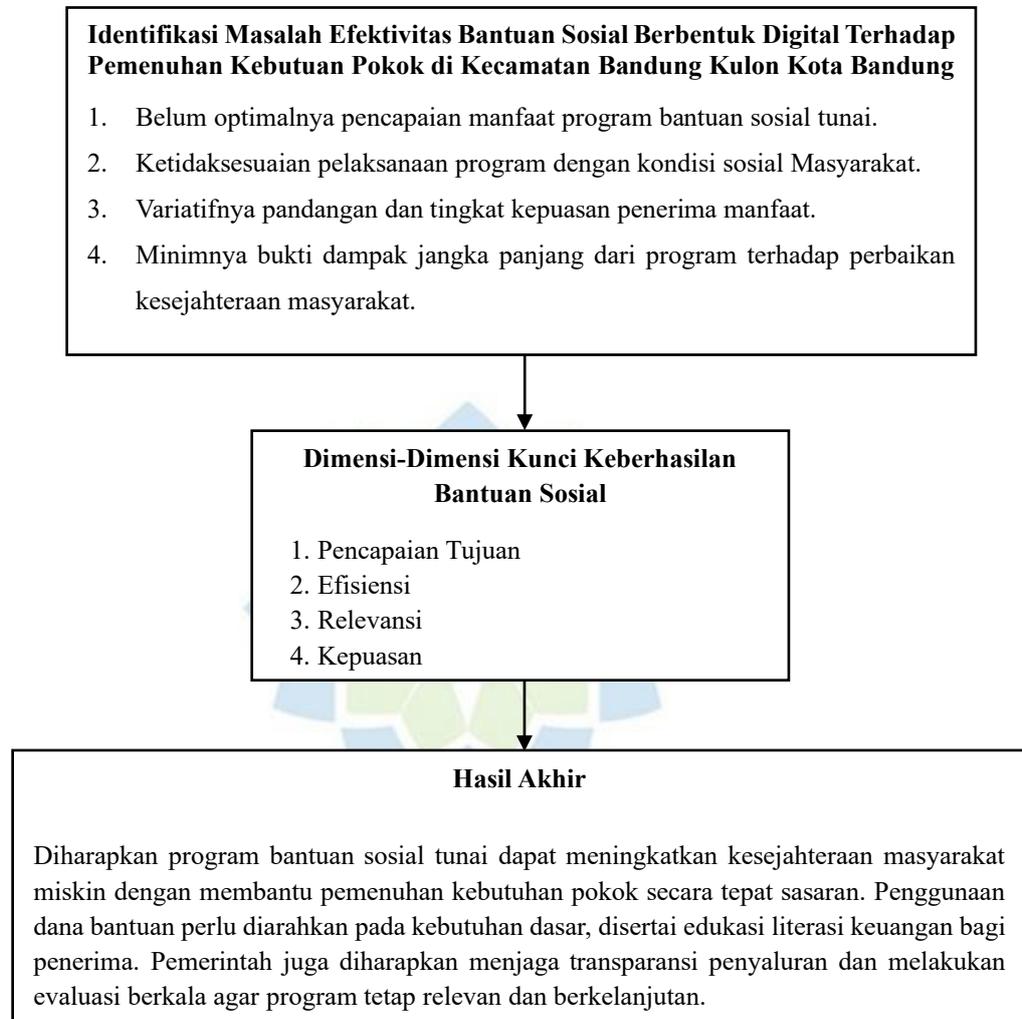
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. **Teoretis** : Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam hal efektivitas kebijakan bantuan sosial sebagai alat untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk pengembangan teori dan sumber referensi akademik terkait evaluasi berbagai bentuk bantuan sosial, baik dalam bentuk barang maupun digital, dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penelitian ini juga menawarkan sudut pandang baru dalam analisis kebijakan publik, yang dapat dijadikan acuan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan

strategi yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengatasi persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. **Praktis** : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan langsung bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Temuan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, khususnya di tingkat daerah seperti Kecamatan Bandung Kulon, untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas program bantuan sosial, baik berupa barang maupun digital. Selain itu, penelitian ini dapat membantu lembaga yang melaksanakan program sosial untuk memahami tantangan serta kebutuhan masyarakat penerima bantuan, sehingga distribusi bantuan dapat lebih tepat sasaran. Bagi masyarakat penerima manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar secara optimal. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak lain, seperti organisasi non-pemerintah atau komunitas lokal, dalam mendukung program-program kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

F. Kerangka Berpikir



Sumber : Hasil Penelitian (Diolah peneliti, 2025)

Permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian mengenai efektivitas bantuan sosial berbentuk digital terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, mencakup berbagai aspek krusial yang saling berkaitan dan memengaruhi keberhasilan program secara keseluruhan. Pertama, pencapaian manfaat dari program bantuan digital masih dinilai belum maksimal. Meskipun secara administratif program telah tersalurkan, namun dalam praktiknya banyak penerima manfaat yang belum benar-benar merasakan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mereka, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan program dengan hasil yang dicapai di tingkat penerima. Kedua, pelaksanaan program bantuan digital sering kali belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus, bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan, baik karena jumlah yang terbatas maupun karena kurangnya pemahaman penerima dalam mengelola bantuan tersebut secara tepat. Ketiga, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keragaman persepsi dan tingkat kepuasan di kalangan penerima manfaat. Perbedaan ini mencerminkan bahwa efektivitas program bantuan digital tidak dapat dipandang secara seragam, karena dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi, dan tingkat literasi penerima yang berbeda-beda. Sebagian merasa sangat terbantu, sementara yang lain merasa bahwa bantuan tersebut tidak cukup atau tidak digunakan secara optimal. Keempat, belum tersedianya data dan bukti kuat mengenai dampak jangka panjang dari program bantuan digital terhadap peningkatan kesejahteraan menjadi salah satu kekhawatiran utama. Minimnya evaluasi berkelanjutan membuat sulit untuk menilai apakah program ini mampu mendorong perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin atau justru hanya memberikan bantuan sementara tanpa dampak jangka panjang. Oleh karena itu, keempat aspek tersebut menjadi sorotan penting dalam penelitian ini, yang bertujuan tidak hanya untuk mengidentifikasi kelemahan program, tetapi juga untuk memberikan masukan dalam perbaikan desain dan implementasi bantuan sosial ke depan.

Menurut (Richard Steers & Price, 1977) untuk menilai keberhasilan program dapat digunakan empat dimensi kunci, yaitu: pencapaian tujuan, efisiensi, relevansi, dan kepuasan. Dimensi-dimensi ini menjadi indikator dalam mengukur sejauh mana program bantuan sosial digital dapat dikatakan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai hasil akhir yang diharapkan, program bantuan sosial digital diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Bantuan ini seharusnya tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sementara dari pemerintah, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang dalam mengurangi angka kemiskinan dan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Agar tujuan tersebut tercapai, penggunaan dana bantuan oleh penerima manfaat perlu diarahkan dengan baik, yaitu dengan memprioritaskan pengeluaran pada kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Untuk mendukung hal tersebut, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk menyertakan program pendampingan dan edukasi literasi keuangan, sehingga para penerima manfaat memiliki kemampuan dalam mengelola bantuan secara bijak dan produktif. Edukasi ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan penggunaan dana, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan agar masyarakat dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya di masa depan.

Guna memastikan program bantuan sosial digital benar-benar mencapai tujuannya, dibutuhkan dukungan sistem yang kuat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pemerintah perlu membangun mekanisme koordinasi yang sinergis antar lembaga terkait, termasuk dinas sosial, pemerintah daerah, dan pihak penyalur seperti PT Pos atau perbankan, agar proses penyaluran berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Peran teknologi informasi juga sangat penting dalam memperkuat sistem pendataan dan pelaporan, sehingga meminimalkan kesalahan distribusi maupun potensi penyalahgunaan. Selain itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu memberikan dampak nyata

terhadap peningkatan kualitas hidup penerima. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh dan berbasis data perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur dampak program dalam jangka pendek maupun panjang. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyempurnakan kebijakan, baik dari sisi mekanisme, nilai bantuan, maupun pendekatan pendampingan yang lebih manusiawi dan adaptif. Dengan cara ini, program bantuan sosial digital tidak hanya menjadi intervensi sementara, tetapi menjadi bagian dari proses transformasi sosial yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

